

politik yang dewasa diperlukan beberapa persyaratan yang memadai dan kekayaan nasional.

Kedua pandangan tentang hubungan antara partisipasi dengan modernisasi ini merupakan klasifikasi yang tipologis sifatnya karena dalam kenyataannya perbedaan itu tidaklah terlalu tajam. Namun satu hal yang jelas dari uraian ini, yaitu partisipasi dipandang sebagai hal yang penting dalam masyarakat yang demokratis seperti sekarang ini.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa partisipasi merupakan perilaku yang berupa keikutsertaan masyarakat pada suatu aktivitas tertentu. Partisipasi politik diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat pada aktivitas politik. Keikutsertaan masyarakat tersebut terwujud dalam sikap dan tindakannya sebagai bentuk reaksi terhadap produk-produk politik. Ketika hendak mengambil suatu tindakan politik, seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) harus membuat tiga keputusan, yaitu (1) memutuskan bertindak ataukah tidak, (2) memutuskan arah tindakan itu, (3) memutuskan mengenai intensitas dan durasi (lamanya) tindakan politik tersebut.

3. Dimensi-dimensi Partisipasi politik

Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi tiga dimensi, yaitu: (1) partisipasi aktif, (2) partisipasi pasif, dan (3) partisipasi tidak aktif (*inactive*). Secara umum dapat dibedakan bahwa partisipasi aktif adalah kegiatan yang sifatnya “memengaruhi” proses input politik, seperti mengajukan petisi, demonstrasi, kontak dengan pejabat pemerintah, anggota aktif, atau pengurus partai politik dan mengajukan alternatif keputusan politik yang berlainan

kepercayaan (*belief*), dan sikap (*attitudes*). Menurut pendekatan ini lingkungan sosial tidak memengaruhi perilaku politik secara langsung, melainkan berpengaruh melalui faktor kepribadian sebagai faktor perantara. Dalam pada itu faktor lingkungan sosial masih bisa dibagi dua, sebagai berikut:

- a) Faktor lingkungan tak langsung. Lingkungan sosial tak langsung tidak berpengaruh terhadap kepribadian secara langsung melainkan melalui faktor lingkungan langsung.
- b) Faktor sosial langsung, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 1. Lingkungan sosial langsung yang memengaruhi faktor kepribadian;
 2. Lingkungan langsung yang disebut situasi yang langsung memengaruhi perilaku politik.

Faktor disposisi (*predisposisi*) atau kepribadian sebenarnya masih dibagi tiga variabel, yaitu:

- a) Kepercayaan dan sikap, yang dimaksud dengan kepercayaan (*belief*) ialah kognisi-kognisi (pengetahuan dan pemahaman) yang disertai perasaan percaya (*credibility*), yang dibedakan dengan pengetahuan yang tak dipercayai. Jadi, kepercayaan ini bisa benar atau salah, tetapi kepercayaan yang salah tetap merupakan kepercayaan. Sebab kebenaran atau kesalahan, suatu kepercayaan secara logika bebas dari kepastian psikologi mempunyai

seseorang merupakan upaya mengatasi konflik batin atau tekanan psikis dalam yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi dengan *aggressor*.

- b) Kebutuhan dan dorongan. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi lima, yaitu: (1) kebutuhan fisik (makanan, air, tidur); (2) keselamatan (tertib dan lingkungan yang dapat diramalkan); (3) cinta, afeksi, dan rasa memiliki; (4) penghargaan atas diri (*self esteem*); dan (5) aktualisasi diri. Beberapa dari di antara kebutuhan ini, khususnya kebutuhan fisik-biologis naik turun secara siklus. Pada waktu kebutuhan fisik-biologis sangat diperlukan, organisme menjadi semakin berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan itu.
- c) *Heredity* (bawaan). Jika kebutuhan fisik-biologis ini telah dipenuhi secara rutin, maka organisme dapat beralih ke perilaku sosiopolitik. Kebutuhan-kebutuhan di atas sebagian dikembangkan dari bawaan dan sebagian lagi dari lingkungan sosial langsung (sosialisasi dari lingkungan).

Berkaitan dengan pendekatan disposisional, bahkan barangkali merupakan penyederhaan dari model diatas, beberapa ahli melihat faktor kesederhaan politik dan sikap dan kepercayaan terhadap pemerintahan sebagai faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik. Kesadaran politik diartikan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan

lain status sosial, status ekonomi, kelas, subkultur dan tipe rezim yang berkuasa dalam suatu masyarakat.

Status sosial dan ekonomi merupakan suatu rujukan kelompok yang penting bagi banyak orang karena banyaknya ikatan yang menghubungkan mereka dengan status tersebut. Yang menjadi indikator status sosial antara lain pekerjaan dan pendidikan; sedangkan indikator status ekonomi antara lain pendapatan, pengeluaran, pemilikan dan penguasaan tanah, ataupun pemilikan barang-barang berharga. Orang yang mempunyai status sosial yang tinggi belum tentu mempunyai status ekonomi yang tinggi.

Kelompok masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah biasanya mempunyai partisipasi politik yang rendah pula. Hal ini disebabkan kelompok masyarakat yang berstatus sosial dan ekonomi yang rendah tidak mempunyai waktu bebas yang memadai untuk kegiatan politik, tidak mempunyai jaminan ekonomi sehingga merasa tak mampu berbuat sesuatu terhadap lingkungan politik, kurang akses pada informasi dan alternatif, dan kemungkinan untuk rugi dari keputusan politik bagi kelompok ini lebih rendah daripada ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang berstatus sosial dan ekonomi yang tinggi dari keputusan politik.